



GOVERNMENT ACCOUNTING COMPETENCY IMPROVEMENT FOR TEACHERS

Dani Sugiri^{1*}, Budi Mulyana², Tanda Setiya³

^{1,2,3}Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN, Banten, Indonesia

danisugiri@pknstan.ac.id¹, budimulyana@pknstan.ac.id², tanda.setiya@pknstan.ac.id³

ABSTRAK

Abstrak: Kegiatan peningkatan kompetensi akuntansi instansi pemerintah bertujuan membantu guru akuntansi yang tergabung dalam MGMP Kabupaten Lebak. Para guru mengalami kesulitan dalam memahami dan menyampaikan materi mata pelajaran akuntansi instansi pemerintah. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan selama tiga hari untuk guru akuntansi sebanyak 30 orang. Materi pelatihan berisi mengenai konsep pengelolaan keuangan daerah, konsep akuntansi pemerintah daerah serta praktik akuntansi instansi pemerintah daerah. Kegiatan pelatihan juga diisi dengan microteaching bagi peserta pelatihan dan diskusi mengenai kendala pengajaran laboratorium akuntansi instansi pemerintah daerah di lingkup SMK pada Kabupaten Lebak. Kegiatan ini menghasilkan peningkatan kemampuan peserta dalam memahami dan menyelesaikan tiga kasus akuntansi pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai bahan pengajaran di kelas. Kegiatan ini juga dapat merumuskan beberapa kebutuhan penyesuaian kurikulum dan bahan ajar mata pelajaran akuntansi instansi pemerintah di lingkup SMK Kabupaten Lebak.

Kata Kunci: Kompetensi Guru; Akuntansi Pemerintah; Keuangan Daerah.

Abstract: *Activities to increase the accounting competence of government agencies aim to assist accounting teachers who are members of the MGMP of Lebak Regency. Teachers have difficulty understanding and delivering government agency accounting subject matter. Activities carried out in the form of training for three days for accounting teachers as many as 30 people. The training material contains regional financial management concepts, local government accounting concepts and accounting practices of local government agencies. The training activities were also filled with microteaching for training participants and discussions about the constraints of teaching accounting laboratories of local government agencies in the scope of SMK in Lebak Regency. This activity resulted in an increase in the ability of participants to understand and solve three accounting cases in SKPD that could be used as classroom teaching materials. This activity can also formulate some needs for curriculum adjustments and teaching materials for government agencies in the scope of SMK in Lebak Regency.*

Keywords: *Teacher Competence; Government Accounting; Local Finance.*



Article History:

Received : 10-09-2020
Revised : 28-10-2020
Accepted : 12-12-2020
Online : 11-01-2021

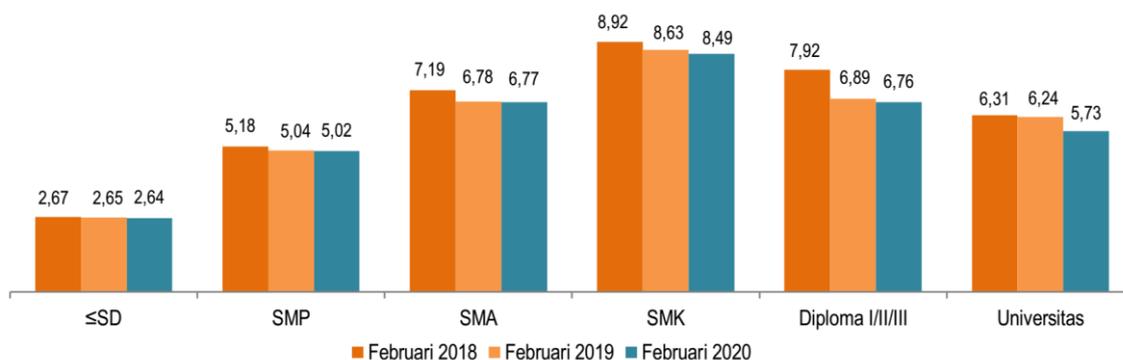


This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tenaga kerja dengan pendidikan tertinggi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menempati posisi tertinggi dibandingkan yang lain (Badan Pusat Statistik, 2020). TPT merupakan perbandingan antara

jumlah pengangguran terhadap total jumlah angkatan kerja pada periode yang sama. Per Februari 2017, tingkat pengangguran terbuka untuk kelompok pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi di antara lulusan pendidikan yang lain yaitu 9,27 persen, diikuti Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,03 persen serta diploma I/II/III sebesar 6,35 persen (Perwita, 2017). Sedangkan pada tahun selanjutnya, tingkat TPT dari tenaga kerja dengan lulusan SMK berturut-turut adalah 8,92% pada Februari 2018, 8,63% pada Februari 2019, dan 8,49% pada Februari 2020. Grafik 1 memberikan gambaran TPT selama tiga tahun berturut-turut. Secara umum terdapat penurunan TPT dari lulusan SMK. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa lulusan SMK menjadi pemuncak dari tenaga kerja dengan pendidikan tertinggi SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi.



Gambar 1. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Badan Pusat Statistika, 2020).

Jenjang pendidikan SMK dimaksudkan menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lulusan SMK diharapkan mandiri dan siap kerja (Perwita, 2017). Namun, realita yang terjadi justru lulusan SMK yang menyumbang jumlah pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menyadarkan kita bahwa kurikulum di SMK belum seutuhnya sesuai harapan kita. Perlu terdapat *link and match* antara pemasok tenaga kerja yaitu SMK dengan penggunaannya (Husein, 2019). Pendidikan Kejuruan perlu mengetahui kompetensi (keahlian) apa yang paling dibutuhkan dunia kerja, atau dengan kata lain terdapat kesesuaian standar kompetensi lulusan SMK sama dengan kompetensi harapan dunia usaha dan dunia industri (Husein, 2019).

Sejak tahun 2017 telah dimulai perubahan yang besar dalam struktur kurikulum SMK (Fitria, Afriyenti, Arza, & Angelina, 2019). Perubahan tersebut antara lain munculnya mata pelajaran “praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintahan” yang akan diajarkan pada kelas XI dan XII. Akuntansi pemerintahan. Selanjutnya pada Tahun 2018, terbit Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 462/D.5/KR/2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada

Sekolah Menengah Kejuruan dengan diwajibkan mata pelajaran Praktik Akuntansi Instansi/Lembaga Pemerintah.

Materi dalam kurikulum mata pelajaran akuntansi pemerintah berbeda dengan akuntansi komersial seperti yang kita pelajari selama ini. Akuntansi pemerintahan dicirikan oleh adanya anggaran, tidak bermotif mencari laba, dapat menggunakan lebih dari satu jenis dana, kaku tergantung peraturan, tidak ada kepemilikan modal (Nordiawan, Putra, & Rahmawati, 2008). Dalam akuntansi pemerintah dapat digunakan akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual (Jan Hoesada, 2016). Dalam akuntansi pemerintah juga sering terdapat kebijakan akuntansi yang spesifik seperti nilai minimal kapitalisasi pada saat perolehan aset (Sugiri, 2019). Namun demikian, kedua jenis akuntansi tersebut memiliki kesamaan pada aspek pencapaian tujuan akuntabilitas, manajerial dan pengawasan (Nordiawan et al., 2008).

Implementasi dari perubahan kurikulum tersebut bukan tanpa kendala. Pengajaran akuntansi instansi pemerintah membutuhkan media pembelajaran yang berisi latihan-latihan yang dapat dikerjakan oleh siswa/peserta (Fitria et al., 2019). Fakta lapangan, dalam pengajaran akuntansi instansi pemerintah pada SMK, masih terdapat keterbatasan buku dan bahan ajar (Wardani & Listiadi, 2018). Akuntansi pemerintah merupakan bidang yang baru bagi tim pengajar akuntansi pada SMK (Fitria et al., 2019). Kebijakan adanya kurikulum praktik akuntansi instansi pemerintah tersebut berdampak pada ketersediaan SDM guru yang kurang menguasai materi (Elly Astuti, Juli Murwani, & Sugiharto, 2020). Hal ini memberatkan guru untuk dapat mengajarkan materi tersebut kepada siswa. Guru kejuruan harus siap menghadapi tuntutan dan tantangan tersebut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas (Yusuf & Mukhadis, 2018).

Permasalahan dan kendala pengajaran mata pelajaran Praktik Akuntansi Instansi Pemerintah juga dialami oleh guru akuntansi SMK di Kabupaten Lebak yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Terdapat keterbatasan pada kapasitas para guru dan belum memadai dukungan pembelajaran terkait mata pelajaran tersebut, MGMP Akuntansi Kabupaten Lebak mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar khususnya dalam mata pelajaran Akuntansi Instansi Pemerintah. Berdasarkan permasalahan tersebut, MGMP Akuntansi Kabupaten Lebak membutuhkan bantuan pelatihan praktik akuntansi instansi pemerintah kepada PKN STAN.

Pelatihan untuk guru akuntansi yang terhimpun dalam MGMP Akuntansi Kabupaten Lebak ini juga didorong oleh fakta bahwa selama ini belum pernah terdapat pelatihan secara khusus terkait dengan administrasi pajak serta pengelolaan dan akuntansi keuangan daerah. Posisi PKN STAN sebagai perguruan tinggi vokasi di bidang keuangan

negara diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan ketrampilan akuntansi instansi pemerintah yang sesuai kebutuhan profesi dan dunia kerja (Adriwati, 2019). Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk memenuhi permintaan surat tersebut.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pengabdian Masyarakat dari Jurusan Manajemen Keuangan PKN STAN dan tim administrasi dari PPPM PKN STAN. Kegiatan pengmas diselenggarakan dalam bentuk pelatihan singkat bagi guru-guru yang mengajar pelajaran akuntansi instansi pemerintah pada SMK di lingkungan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. PkM serupa pernah dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat UNJ untuk SMK di lingkungan SMK di Jakarta Timur, DKI Jakarta (Anggraini, Hasanah, Fauzi, & Utaminingtyas, 2018).

Pelatihan diselenggarakan dalam tiga hari dengan pemateri merupakan dosen-dosen pengusul program pengmas. Dosen tersebut merupakan pengajar pada Jurusan Manajemen Keuangan PKN STAN yang mendalami/mengajar materi tersebut di kampus.

Selain materi, dalam sesi pelatihan, peserta mendapatkan simulasi pengerjaan studi kasus. Dalam sesi pelatihan juga dimungkinkan setiap peserta mendiskusikan hal-hal terkait dengan materi. Pada tahap akhir pembelajaran, dilakukan *microteaching* akuntansi pemerintah daerah dengan seolah-olah peserta lain sebagai murid di kelas. Pelaksanaan *microteaching* perlu dilakukan karena dapat meningkatkan kesiapan guru menjadi pengajar profesional di kelas (Sofiarani & Susilo, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di SMK N I Lebak, Kabupaten Lebak. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11-13 Maret 2020. Peserta pelatihan berjumlah 30 orang peserta dari SMK di lingkungan Kabupaten Lebak, baik SMK milik pemerintah maupun milik swasta. Kegiatan dilaksanakan berupa pelatihan tentang konsep serta perlakuan akuntansi pada instansi pemerintah.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan kegiatan meliputi tahap identifikasi kebutuhan mitra dan tahap penggalan detail kebutuhan mitra. Identifikasi kebutuhan mitra diperoleh melalui diskusi pendahuluan yang dilakukan oleh perwakilan jurusan di lingkungan PKN STAN dengan perwakilan Dinas Pendidikan Pemprov Banten. Dalam tahapan ini dilakukan pembicaraan mengenai potensi kerja sama Pemerintah Provinsi Banten dengan PKN STAN dalam skema Pengabdian kepada Masyarakat. Salah satu yang dibutuhkan oleh Pemprov Banten adalah program peningkatan kompetensi guru SMK dalam bidang akuntansi

keuangan daerah. Tahap penggalian detail kebutuhan mitra dilakukan komunikasi lebih intens dengan Pengurus Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP) Akuntansi Kabupaten Lebak. Tahap ini menyepakati mengenai materi pelatihan dalam pengabdian masyarakat, jadwal dan lokasi pelaksanaan kegiatan, estimasi peserta serta *cost sharing* dalam pelaksanaan kegiatan. Gambar 1 menyajikan suasana saat pertemuan pendahuluan dengan perwakilan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Banten. Identifikasi permasalahan awal yang dihadapi oleh mitra dan prioritas permasalahan adalah seperti dalam Tabel 1. Kedua permasalahan tersebut akan ditindaklanjuti dalam sebuah pelatihan yang dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat ini.

Tabel 1. Prioritas Permasalahan MGMP Akuntansi Kabupaten Lebak.

No	Permasalahan	Batasan Kegiatan yang akan Dilakukan	Prioritas Permasalahan
1	MGMP belum mendapatkan <i>overview</i> Proses Bisnis Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah	Pelatihan <i>Overview</i> Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah	Prioritas I
1	MGMP belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam perlakuan akuntansi PPKD dan SKPD pada Pemerintah Daerah	Pelatihan Akuntansi Pemerintah Daerah pada SKPD dan PPKD	Prioritas II

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan dengan pemberian materi tentang pengelolaan keuangan daerah, akuntansi pemerintah daerah, serta praktik pengerjaan dan pengajaran akuntansi pemerintah daerah.

a. Pemberian Materi Pengelolaan Keuangan Daerah

Materi Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan untuk memberikan landasan pemahaman pada peserta mengenai lingkungan akuntansi pemerintah daerah. Pemahaman lingkungan pemerintahan penting karena lingkungan akuntansi pemerintah akan berpengaruh pada tujuan, standar, kebijakan dan sistem akuntansi (Indonesia, 2010). Gambar 2 menyajikan foto pasca pembelajaran mengenai konsep pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas definisi keuangan daerah, ruang lingkup keuangan daerah, siklus keuangan daerah, pembagian kewenangan pengelolaan keuangan daerah, prinsip umum pengelolaan keuangan daerah, pengenalan APBD serta pengenalan laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Pemberian Materi dan Simulasi Akuntansi Pemerintah Daerah

Materi akuntansi pemerintah yang diberikan meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Dasar-dasar akuntansi pemerintah daerah, berupa pengenalan standar, prinsip-prinsip, kebijakan dan sistem akuntansi pada pemerintah daerah.
- 2) Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik untuk sistem akuntansi pelaksanaan anggaran serta sistem akuntansi keuangannya.
- 3) Akuntansi pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku satuan kerja dan Bendahara Umum Daerah (BUD) baik untuk sistem akuntansi pelaksanaan anggaran serta sistem akuntansi keuangannya.
- 4) Akuntansi pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka konsolidasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah.

Pada setiap sesi materi, dilakukan simulasi melalui penyelesaian contoh soal kasus pada SKPD ataupun PPKD. Hal ini untuk memberikan gambaran pada peserta mengenai adanya dua sistem akuntansi pada pemerintah daerah, yaitu Sistem Akuntansi SKPD dan Sistem Akuntansi PPKD (Languju, Jantje, & Rudi, 2015). Dalam setiap transaksi, peserta juga diperkenalkan dua jenis jurnal pengakuan akuntansi keuangan pemerintah daerah yaitu jurnal kas dan jurnal akrual (Pasi, Kadir, Hukum, & Area, 2017).

c. Pelaksanaan *Microteaching*

Pada akhir pelatihan dilakukan kegiatan *microteaching* bagi lima peserta yang ditunjuk secara acak. Dalam kegiatan *microteaching* ini, peserta diminta bertindak sebagai guru pengajar akuntansi instansi pemerintah dengan peserta lain sebagai siswa. Materi yang menjadi objek *microteaching* adalah materi yang telah disampaikan dalam pelatihan.

1) Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh tim pengabdian baik pada saat kegiatan pelatihan berlangsung maupun setelah kegiatan berakhir. Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan pengabdian masyarakat dan juga untuk mengetahui tanggapan peserta pelatihan. *Pre-test* dan *post-test* dilakukan dengan menggunakan soal pilihan ganda, mencakup tiga materi: pengelolaan keuangan negara/daerah, akuntansi SKPD dan akuntansi PPKD. Rata-rata hasil *post-test* relatif lebih tinggi dari hasil *pre-test*. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta yang diperoleh selama mengikuti kegiatan pelatihan. Evaluasi juga dilakukan dengan bentuk diskusi antara

tim pengabdian dengan peserta, pengurus MGMP, serta perwakilan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Banten. Pada kesempatan diskusi, tim pengabdian juga menyampaikan bahwa pasca pelatihan, peserta tetap dapat melakukan konsultasi dan diskusi dengan tim pengabdian terkait dengan upaya pemahaman akuntansi pada instansi pemerintah daerah.

D. TEMUAN ATAU DISKUSI

Para guru akuntansi instansi pemerintah mengalami kesulitan melaksanakan tugas menjadi pengajar mata pelajaran Praktik Akuntansi Instansi Pemerintah pada SMK di lingkup Kabupaten Lebak. Kesulitan yang dihadapi oleh para pengajar akuntansi yang tergabung dalam MGMP Akuntansi Kabupaten Lebak tersebut antara lain:

1. Belum terdapat pemahaman atau gambaran praktik secara riil mengenai akuntansi pada instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah.
2. Belum terdapat buku referensi dan bahan ajar yang memadai mengenai akuntansi keuangan pada instansi pemerintah.
3. Masih terdapat kerancuan dan anggapan bahwa instansi pemerintah adalah sama mengenai pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa.
4. Kurikulum mata pelajaran akuntansi instansi pemerintah perlu memisahkan antara akuntansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa, karena ketiga-tiganya memiliki sistem akuntansi pelaporan yang berbeda.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah terlaksana tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa guru-guru SMK peserta pelatihan sangat antusias mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Praktik Akuntansi Instansi Pemerintah Daerah. Peserta membutuhkan pelatihan tersebut karena dapat digunakan sebagai bekal dalam pengajaran mata pelajaran Praktik Akuntansi Instansi Pemerintah yang merupakan mata pelajaran baru sesuai kurikulum terakhir. Berdasarkan hasil *microteaching* yang dilakukan oleh peserta secara acak, dapat diketahui bahwa peserta dapat menyerap penyampaian materi dan dapat menyampaikan kembali kepada orang/pihak lain. Namun demikian, terdapat beberapa saran tim pengabdian sampaikan untuk perbaikan berkesinambungan ke depan, yaitu: 1) perlu dilakukan pengembangan bahan ajar Praktik Akuntansi Instansi Pemerintah yang lebih *update* sesuai dengan perkembangan praktik di dunia pemerintahan; 2) perlu dilakukan penyesuaian kronologis capaian kompetensi inti dan materi

pelajaran Praktik Akuntansi Instansi Pemerintah sesuai dengan pemisahan entitas pelaporan: pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa; dan 3) perlu dilakukan program peningkatan kompetensi akuntansi pada pemerintah pusat dan desa, mengingat pelatihan pada kesempatan kali ini masih terbatas pada instansi pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (PPPM) Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Tim MGMP Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan Kompetensi Akuntansi Instansi Pemerintah untuk para guru akuntansi yang tergabung dalam MGMP Akuntansi Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

DAFTAR RUJUKAN

- Adriwati, A. (2019). Pendidikan Aparatur Sipil Negara di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Implementasi Vocational and Technical Education. *Journal of Business Administration Economics & ...*, 1(1), 36–47.
- Anggraini, R., Hasanah, N., Fauzi, A., & Utamingtyas, T. H. (2018). Peningkatan Pemahaman Guru - Guru SMK Melalui Pelatihan Akuntansi Pemerintah Guna Menyiapkan SDM Instansi Pemerintah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 2(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.21009/JPMM.002.2.11>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020. *Berita Resmi Statistik*, (40), 5.
- Badan Pusat Statistika. (2020). Statistik Indonesia 2020 Statistical Yearbook of Indonesia 2020. *Statistical Yearbook of Indonesia*.
- Elly Astuti, Juli Murwani, & Sugiharto. (2020). Pelatihan Akuntansi Pemerintahan dan Pengelolaan Dana Desa Pada MGMP Kabupaten Madiun. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2 SE-Articles), 214–221. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.3593>
- Fitria, V., Afriyenti, M., Arza, F. I., & Angelina, M. (2019). *Akuntansi Lembaga / Instansi Sumatera Barat*. 15–20.
- Husein, M. T. (2019). Link and match pendidikan sekolah kejuruan. *Journal of Islamic Economics and Bank*, 15(2), 39–62. <https://doi.org/10.77258059418>
- Indonesia, R. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. *Peraturan Pemerintah*, (71).
- Jan Hoesada. (2016). Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan. In *Salemba Empat*.
- Languju, G. V., Jantje, T., & Rudi, P. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi*,

- Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 1044–1052.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2008). *Akuntansi Pemerintahan*.
- Pasi, N., Kadir, A., Hukum, F., & Area, U. M. (2017). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi Implementation of Regional Management Information System Accrual Based to Dairi District Government Sistem Informasi Manajem. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(13), 49–63.
- Perwita, D. (2017). Upaya Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Meningkatkan Minat Berwirausaha Siswa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 5(2), 9–14.
- Sofiarani, N., & Susilo, A. Z. (2019). the Effect of Microteaching and Guided Field Practice (Plt) on Readiness To Become Professional Teacher of the Accounting Education Student State University of Yogyakarta Class of 2015. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 17(2), 38–45. <https://doi.org/10.21831/jpai.v17i2.28692>
- Sugiri, D. (2019). *Perlakuan atas Tidak Perpenuhinya Nilai Minimal Kapitalisasi Aset: Studi Kasus pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*. Vol. 3(No. 2), 25–35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31092/jmkp.v3i2.525>
- Wardani, Q., & Listiadi, A. (2018). Pengembangan Buku Ajar Berbasis Pendekatan Saintifik pada Mata Pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga / Instansi Pemerintah Kelas XI AKL di SMK Negeri 1 Sooko Mojokerto. *Jurnal Pendidikan Akuntansi, Volume 8 N(2018)*, 473–481.
- Yusuf, A. R., & Mukhadis, A. (2018). Model Pengembangan Profesionalitas Guru Sesuai Tuntutan Revitalisasi Pendidikan Vokasi Di Indonesia. *Lectura : Jurnal Pendidikan*, 9(2), 130–139. <https://doi.org/10.31849/lectura.v9i2.1613>

DOKUMENTASI KEGIATAN

Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan program pengabdian masyarakat untuk guru Akuntansi di MGMP Kabupaten Lebak.



Gambar 1. Pertemuan Pendahuluan Membahas Kebutuhan Mitra.



Gambar 2. Pasca Sesi Pengenalan Pengelolaan Keuangan Daerah.



Gambar 3. Pasca Sesi Materi dan Simulasi Akuntansi Pemda.



Gambar 4. Sesi *Microteaching* salah satu Peserta.



Gambar 5. Diskusi Peserta, Tim Pengabdian dan Pejabat Terkait.